

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2023





Program Studi	
Administrasi Pembangunan Negara Program Dokter Terapan	
Nama Mata kuliah	
Kebijakan Pembangunan	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/CPMK	
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu: (1) Menganalisis masalah pembangunan secara sistematis berdasarkan teori, data dan bukti empiris. dan Mengidentifikasi agenda dan prioritas kebijakan pembangunan. (2) Menganalisis Agenda Kebijakan Pembangunan, Analisis Aktor dan Kepentingan (3) Menganalisis Kebijakan Pembangunan (4) Menyusun Policy Design dan Policy Instrument (5) Menganalisis integrasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. (6) Menyusun Evidence-Informed Policy (7) Menganalisis Implementasi Kebijakan (8) Menganalisis Kelembagaan dan Tata Kelola (9) Mengevaluasi efektivitas, efisiensi, relevansi, koherensi dan keberlanjutan kebijakan dan Menghasilkan policy paper policy dan recommendation berbasis evidence.	
Nama-Nama Praktikum	
<i>Bagian 1 (Sebelum UTS)</i> Praktikum 1 – Identifikasi dan Diagnosis Masalah Pembangunan Praktikum 2 – Analisis Agenda Kebijakan Pembangunan, Analisis Aktor dan Kepentingan Praktikum 3 – Analisis Kebijakan Pembangunan Praktikum 4 – Policy Design dan Policy Instrument <i>Bagian 2 (Sebelum UAS)</i> Praktikum 5 – Policy Integration Praktikum 6 – Evidence-Informed Policy Praktikum 7 - Analisis Implementasi Kebijakan Praktikum 8 – Analisis Kelembagaan dan Tata Kelola Praktikum 9 – Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan; Policy Brief dan Rekomendasi Kebijakan	
Waktu/durasi (menit)	Sumberdaya/input
150 menit per praktikum/pertemuan	1. Kebijakan nasional/daerah/sektoral dll 2. Data statistik dan pembangunan 3. Literatur, informan, dokumen program, internet.
Tempat	
Laboratorium Administrasi	
Catatan	

Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa tercurah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Modul Praktikum Mata Kuliah Kebijakan Pembangunan untuk Program Doktor Terapan Administrasi Pembangunan Negara ini dapat disusun sebagai salah satu perangkat pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi analitis dan aplikatif mahasiswa.

Kebijakan pembangunan merupakan instrumen penting pemerintah dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program, kegiatan, regulasi, kelembagaan, pembiayaan, serta intervensi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, mahasiswa perlu memahami kebijakan tidak hanya sebagai dokumen normatif, tetapi sebagai proses yang melibatkan masalah publik, bukti, kepentingan, aktor, kelembagaan, sumber daya, implementasi, serta evaluasi.

Modul ini dikembangkan dengan mengacu pada kerangka perencanaan pembangunan nasional, terutama RPJMN 2025–2029, serta perkembangan mutakhir dalam studi kebijakan publik, policy analysis, policy design, policy implementation, policy integration, evidence-informed policymaking, dan policy evaluation. RPJMN 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun.

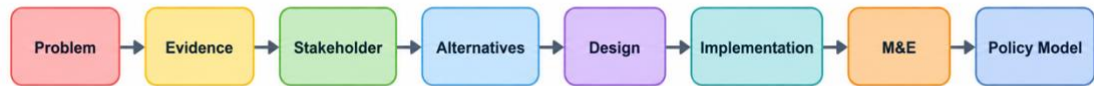
Praktikum dirancang agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan persoalan pembangunan nyata. Setiap praktikum menghasilkan output yang dapat dikembangkan menjadi policy brief, policy memo, policy design, implementation framework, monitoring framework, evaluation design, dan rekomendasi kebijakan.

Modul ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga menghasilkan kompetensi profesional sebagai policy analyst, policy designer, policy evaluator, dan pengelola kebijakan pembangunan.

Jakarta, Juli 2023

Delapan praktikum dibuat sebagai satu rangkaian *Policy Laboratory*, bukan delapan tugas yang berdiri sendiri.

Alurnya:



Pada akhir semester mahasiswa menghasilkan satu produk kebijakan yang utuh.

PRAKTIKUM 1

POLICY PROBLEM IDENTIFICATION & DEVELOPMENT PROBLEM DIAGNOSIS

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah pembangunan secara sistematis berdasarkan evidence.

Tujuan : Mahasiswa mampu membedakan: masalah pembangunan; gejala; akar masalah; dampak; masalah kebijakan; masalah implementasi.

Sumber daya/input

- a. RPJPN 2025–2045.
- b. RPJMN 2025–2029.
- c. RPJMD/RKPD daerah.
- d. Renstra kementerian/lembaga.
- e. BPS
- f. Data sektoral.
- g. Hasil penelitian.
- h. Berita/dokumen resmi pemerintah.
- i. Data hasil observasi/wawancara jika tersedia.

RPJMN 2025–2029 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan serta kerangka regulasi dan pendanaan indikatif.

Problem Evidence Sheet

Komponen	Isi
Isu pembangunan	...
Kondisi aktual	...
Kondisi ideal	...
Gap	...
Bukti/data	...
Kelompok terdampak	...
Penyebab utama	...
Dampak	...
Urgensi	...

Prosedur

- a. Pilih satu isu pembangunan.
- b. Identifikasi kondisi ideal.
- c. Kumpulkan evidence.
- d. Identifikasi gap.
- e. Susun problem tree.
- f. Identifikasi akar masalah.
- g. Validasi problem melalui minimal 3 sumber.
- h. Tentukan core policy problem.

Output: Development Policy Problem Diagnosis 5–7 halaman.

PRAKTIKUM 2

EVIDENCE-BASED DEVELOPMENT POLICY

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu melakukan evidence synthesis sebagai dasar perumusan kebijakan.

Sumber daya

- a. artikel Scopus;
- b. artikel Sinta;
- c. laporan Bappenas;
- d. BPS;
- e. World Bank;
- f. OECD;
- g. UNDP;
- h. dokumen kementerian/lembaga;
- i. data administratif.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa kapasitas implementasi menjadi faktor penting dalam menghubungkan kebijakan dengan hasil kebijakan. Yang et al. (2024), misalnya, mengembangkan kerangka RACM – Room, Aspiration, Capital, Methods untuk menganalisis kapasitas implementasi kebijakan.

Dokumen

Evidence Matrix

Evidence	Temuan	Metode	Konteks	Relevansi	keterbatasan
Artikel 1					
Artikel 2					
Data BPS					
Policy Report					

Prosedur

1. Tentukan pertanyaan evidence.
2. Cari minimal: 5 artikel Scopus; 3 artikel Sinta; 3 dokumen kebijakan; 2 data statistik.
3. Bandingkan temuan.
4. Identifikasi konsistensi/kontradiksi.
5. Tentukan evidence gap.
6. Susun evidence synthesis.

Output: Evidence-Based Policy Brief, 7–10 halaman.

PRAKTIKUM 3

STAKEHOLDER & POLICY NETWORK ANALYSIS

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu menganalisis aktor, kepentingan, pengaruh dan hubungan antar aktor dalam kebijakan pembangunan.

Sumber daya

- a. policy documents;
- b. organizational structure;
- c. stakeholder interviews;
- d. berita resmi;
- e. laporan program;
- f. data kelembagaan.

Dokumen

Stakeholder Analysis Matrix

Stakeholder	Interest	Power	Resources	Position	Potential Role
Pemerintah					
Dunia Usaha					
Masyarakat					
Akademisi					
NGO					

Prosedur

1. Identifikasi stakeholder.
2. Klasifikasikan berdasarkan: power; interest; legitimacy; resources.
3. Identifikasi hubungan.
4. Identifikasi konflik kepentingan.
5. Identifikasi aktor kunci.
6. Buat policy network map.
7. Tentukan mekanisme koordinasi yang diperlukan.

Output: Stakeholder & Policy Network Map + Analysis Report.

PRAKTIKUM 4

POLICY AGENDA & ALTERNATIVE POLICY FORMULATION

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu merumuskan alternatif kebijakan berdasarkan masalah dan evidence.

Sumber daya

- a. hasil Praktikum 1;
- b. evidence matrix;
- c. stakeholder analysis;
- d. RPJMN/RPJMD;
- e. regulasi sektoral.

Prosedur

1. Mahasiswa menyusun minimal 3 alternatif kebijakan.

Contoh:

Alternatif	Intervensi	Target	Kelebihan	Risiko
A	Regulasi			
B	Insentif			
C	Kolaborasi			

2. feasibility analysis;
3. political feasibility;
4. administrative feasibility;
5. financial feasibility;
6. social feasibility;
7. environmental feasibility.

Output: Policy Alternatives Paper.

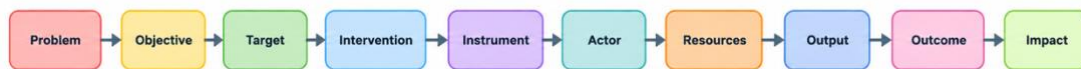
PRAKTIKUM 5

POLICY DESIGN & POLICY INSTRUMENT

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu merancang kebijakan pembangunan dan memilih instrumen kebijakan yang sesuai.

Materi

Policy design meliputi:



Sumber daya

- a. hasil Praktikum 1–4;
- b. regulasi;
- c. policy instruments;
- d. data anggaran;
- e. data kelembagaan.

Prosedur

Mahasiswa menyusun:

1. policy objective;
2. target population;
3. policy instrument;
4. intervention logic;
5. actor;
6. resources;
7. implementation mechanism;
8. expected outcome;
9. risk;
10. mitigation.

Output: Policy Design Canvas.

PRAKTIKUM 6

POLICY IMPLEMENTATION & POLICY CAPACITY ANALYSIS

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu merancang strategi implementasi kebijakan pembangunan berdasarkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara jumlah/kompleksitas kebijakan dan kapasitas implementasi dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Fernández-i-Marín et al. menemukan hubungan antara policy growth, implementation capacity dan policy performance.

Sumber daya

- a. policy design;
- b. institutional structure;
- c. SOP;
- d. budget;
- e. human resources;
- f. regulatory framework;
- g. stakeholder map;
- h. implementation data.

Prosedur

1. Analisis menggunakan enam dimensi:
2. policy clarity;
3. institutional capacity;
4. financial capacity;
5. human resource capacity;
6. coordination capacity;
7. implementation governance.

Output: Policy Implementation Strategy

PRAKTIKUM 7

POLICY MONITORING & EVALUATION DESIGN

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu merancang sistem monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan.

PP No. 39 Tahun 2006 secara khusus mengatur tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sumber daya

- a. policy design;
- b. implementation strategy;
- c. baseline data;
- d. target indicators;
- e. RPJMN/RPJMD;
- f. performance reports.

Prosedur

1. Mahasiswa menyusun:



2. Kemudian menentukan indikator:

Level	Indicator Frequency	Baseline	Target	Source
Input				
Output				
Outcome				
Impact				

Output: Policy M&E Framework

PRAKTIKUM 8

POLICY MODEL & DEVELOPMENT POLICY RECOMMENDATION

Sub-CPMK: Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil analisis menjadi model/rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan aplikatif.

Sumber daya

Seluruh output Praktikum 1–7.

Prosedur

Mahasiswa melakukan:

1. sintesis problem;
2. sintesis evidence;
3. stakeholder synthesis;
4. policy alternative selection;
5. policy design;
6. implementation strategy;
7. M&E;
8. risk analysis;
9. policy learning;
10. penyusunan model kebijakan.

Output akhir: Development Policy Model + Policy Paper

RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

<i>Aspek</i>	<i>Bobot</i>
Ketepatan identifikasi masalah	15%
Kualitas evidence	15%
Kedalaman analisis	20%
Integrasi teori dan kebijakan	15%
Kualitas desain/intervensi	15%
Feasibility	10%
Inovasi/relevansi solusi	5%
Kualitas output	5%
Total	100%

Untuk level doktor terapan, kedalaman analisis dan kemampuan mengintegrasikan evidence dengan praktik kebijakan sebaiknya diberi bobot lebih besar daripada sekadar kelengkapan administrasi tugas.

REFERENSI

Kebijakan

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini mencakup ruang lingkup perencanaan, tahapan perencanaan, penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi.
- b. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045. RPJPN 2025–2045 menjadi dasar hukum pembangunan nasional untuk periode 20 tahun.
- c. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. RPJMN menjadi kerangka utama pembangunan jangka menengah dan memuat strategi, kebijakan umum, program lintas kementerian/lembaga, pembangunan kewilayahan, regulasi dan pendanaan indikatif.
- d. PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- f. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagai dasar terbaru penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

Jurnal

- Andriany & Ariyanti (2023), Implementasi Kebijakan Keterbukaan dan Informasi Publik, *JIASK*, 6(1), 35–52.
- Fernández-i-Marín, X., Hinterleitner, M., Knill, C., & Steinebach, Y. (2023). Policy growth, implementation capacities, and the effect on policy performance. *Governance*, 37(3), 927–945.
- Hustad, O. (2023). From global goal to local development policy: How partnerships as a policy idea changes through policy translation. *Development Policy Review*, 41, e12659.
- Seftian et al. (2023), Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, *JIASK*, 5(2), 241–256
- Trein, P., Fischer, M., Maggetti, M., et al. (2023). Empirical research on policy integration: A review and new directions. *Policy Sciences*, 56, 29–48.
- Yang, L., Wu, Y., Yue, Q., et al. (2024). Working together: an RACM model of policy implementation capacity. *Global Public Policy and Governance*, 4, 56–85.

Widianingsih, I., Abdillah, A., & Adikancana, Q. M. (2024). Inclusive development policy research: research identification, and future agenda. *Cogent Social Sciences*, 10(1).